

Muhammad Rizaldi, S.H., LL.M

Email: mrizaldi@ijrs.or.id

LinkedIn: [Muhammad Rizaldi](#)



Profil Singkat

Muhammad Rizaldi merupakan lulusan program sarjana Hukum, Universitas Indonesia. Ia kemudian menempuh program magisternya di the University of Melbourne dengan fokus studi yang sama melalui jalur beasiswa 'Australia Awards Scholarship 2018'.

Ketertarikannya pada isu Peradilan, Disabilitas dan Perdagangan Orang membuatnya terlibat dalam beberapa program selama berkarir di IJRS, antara lain: *Riset Reformasi Hukum Acara Pidana yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas* dan *Penyusunan draft Pedoman Kejaksaan tentang Akomodasi Yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan* yang kesemuanya didukung oleh AIPJ pada tahun 2023.

Terbaru, ia aktif sebagai Program Officer pada program *Penguatan Dasar Hukum Open Government indonesia* bersama Bappenas dan Ford Foundation sebagai mitra pembangunannya.

Jabatan Saat Ini

Rekanan Peneliti

Pendidikan

1. S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (lulus 2013)
2. S2 Master of Law di the University of Melbourne (lulus 2019)

Pengalaman Kerja

1. Paralegal di LBH Masyarakat (2011)
2. MaPPI FHUI (2013 - sekarang)
3. IJRS (2019 - sekarang)

Program IJRS yang Pernah Dijalankan

1. Program Officer - Riset Anggaran Bantuan Hukum - NCHR 2023
2. Program Manager - Penyusunan draft Pedoman Kejaksaan tentang Akomodasi Yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan - AIPJ2 2023
3. Program Officer - Riset Reformasi Hukum Acara Pidana yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas - AIPJ 2023

Program IJRS yang Sedang Dijalankan

1. Program Officer - Penguatan Dasar Hukum Open Government Indonesia - Ford Foundation 2023
2. Peneliti - Riset Portal Informasi Bantuan Hukum di Indonesia - TIFA 2023
3. Peneliti - Pemberdayaan Masyarakat terkait hak Perempuan dalam Peradilan - LEF 2023

Hasil Publikasi

Buku

1. Tinjauan Hukum Implementasi UU PTPPO Di Indonesia (2023) Jakarta: IJRS
2. Pembaharuan Hukum Acara Pidana untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum (2022) Jakarta: IJRS
3. Modul Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2023) Jakarta: Badiklat Kejaksaan

Artikel Jurnal

1. Menakar Partisipasi Publik dalam Mengawasi Kinerja Aparat Penegak Hukum Pada Persidangan Pidana (2017). Jurnal Teropong Vol. 6 (Juli-Des), Jakarta: MaPPI FHUI

Opini

1. Why legal aid is not working in Indonesia (2019) Indonesia at Melbourne, <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/why-legal-aid-is-not-working-in-indonesia/>

Tulisan di Media

1. Kebebasan berpendapat di internet dan hukum pidana. (2019) detik.com. <https://news.detik.com/kolom/d-4647796/kebebasan-berpendapat-di-internet-dan-hukum-pidana>
2. Seleksi Pimpinan KPK: Memilih Pemain Bintang atau Pemberantasan Korupsi. (2019) detik.com. <https://news.detik.com/kolom/d-4616635/seleksi-pimpinan-kpk-pemain-bintang-atau-pemberantasan-korupsi>

Pencapaian

1. Awardee, Australia Awards Scholarship, 2018.